



WALI KOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALI KOTA BATAM
NOMOR 51 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATAM,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang. . .

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2024 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

10. Peraturan. . .

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
14. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Batam Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 6);
16. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 44 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2026 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2025 Nomor 1614);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Batam.
3. Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2026 yang selanjutnya disebut RKPD Kota Batam Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA-Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
8. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah otonom untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

BAB II. . .

BAB II RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 merupakan penjabaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, RKPD Tahun 2026, kondisi lingkungan strategis Daerah dan hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Triwulan II tahun 2025.
- (2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I PENDAHULUAN
 - b. BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025
 - c. BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
 - d. BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
 - e. BAB IV PENUTUP

Pasal 3

Penjabaran Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan menjadi Lampiran I sampai dengan Lampiran XLV dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 4

Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi:

- a. acuan penyusunan RKA-Perangkat Daerah;
- b. landasan penyusunan KUA dan PPAS untuk menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026; dan
- c. bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah telah disusun berlandaskan RKPD.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar. . .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 18 SEPTEMBER 2025

WALI KOTA BATAM,



AMSAKAR ACHAMAD

Diundangkan di Batam
pada tanggal 18 SEPTEMBER 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM,

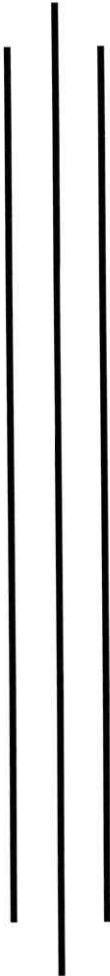


FIRMANSYAH

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2025 NOMOR 1621

LAMPIRAN XXXIII : PERATURAN WALI KOTA BATAM
NOMOR : 51 TAHUN 2025
TENTANG : RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2026

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN 2026





RENCANA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 2026



PEMERINTAH KOTA BATAM SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 2025

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam Tahun 2026.

Rencana Kerja (Renja) adalah dokumen perencanaan kerja perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja (Renja) memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam ini dimaksudkan untuk memberikan arah sekaligus pedoman bagi seluruh jajaran pejabat dan staf di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan di bidang Trantibum dan Linmas, dan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam Tahun 2026.

Semoga Rencana Kerja (Renja) ini dapat dipedomani oleh seluruh pejabat dan staf di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat guna menyukkseskan visi dan misi Pemerintah Kota Batam.

Batam, 10 September 2025
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Batam



Imam Tohari, SH. MH.
MP. 19730510 200701 1 033

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.1.1 Pengertian Renja Perangkat Daerah	1
1.1.2 Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah	1
1.1.3 Keterkaitan Antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	2
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.4 Sistematika Penulisan.....	4
 BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	 6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	23
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	26
2.3.1 Tingkat Kinerja Perangkat Daerah	26
2.3.2 Permasalahan dan Hambatan	26
2.3.3 Peluang dan Tantangan	28
2.3.4 Isu-Isu Penting/Strategis Pelayanan Perangkat Daerah	29
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	29
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	40
 BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	 41
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	41
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	42
3.3 Program dan Kegiatan	43
 BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	 58
 BAB V PENUTUP	 67
5.1 Catatan Penting	67
5.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan	67
5.3 Rencana Tindak Lanjut	68

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 Kota Batam.....	8
Tabel 2.2	Pencapaian kinerja Pelayanan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam	24
Tabel 2.3	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Kota Batam.....	30
Tabel 2.4	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Kota Batam	40
Tabel 3.1	Target Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam Tahun 2026.....	42
Tabel 3.2	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiran Maju Tahun 2027 Kota Batam.....	46
Tabel 4.1	Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026	58

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Tahapan Penyusunan Renja 2

Gambar 1.2 Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan
Dokumen Perencanaan Lainnya 2

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan Pembangunan Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah, sehingga dengan Undang-undang ini kita mengenal satu bagian penting dari perencanaan daerah yaitu rencana pembangunan daerah.

1.1.1 Pengertian Renja Perangkat Daerah

Rencana pembangunan daerah terdiri atas RPJPD, RPJMD, dan RKPD sedangkan Rencana Perangkat Daerah terdiri atas Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renja menjadi jembatan antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan tahunan. Di dalam Renja berisikan juga evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat strategi, program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditransformasikan melalui Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

1.1.2 Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Renja disusun dengan tahapan sebagaimana tergambar pada alur sebagai berikut:

- a. Persiapan penyusunan Renja
- b. Penyusunan Rancangan Awal Renja
- c. Penyusunan Rancangan Renja
- d. Pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah
- e. Perumusan Rancangan Akhir Renja
- f. Penetapan Renja.

Renja Perangkat Daerah memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Program dan kegiatan dimaksud meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja, dan kelompok sasaran yang menjadi bahan utama RKPD, serta menunjukkan prakiraan maju.

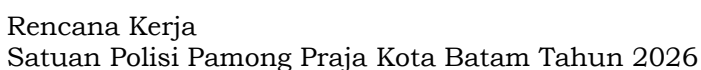
```

graph LR
    RA_RKPD[Rancangan Awal RKPD] --> R_RKPD[Rancangan RKPD]
    R_RKPD --> M_RKPD[Musrenbang RKPD]
    M_RKPD --> RA_RKPD_A[Rancangan Akhir RKPD]
    RA_RKPD_A --> P_RKPD[Penetapan RKPD]
    P_RKPD --> RA_Renja_PD[Rancangan Awal Renja PD]
    RA_Renja_PD --> R_Renja_PD[Rancangan Renja PD]
    R_Renja_PD --> V_Bapeltbangda_1{Verifikasi Bapeltbangda}
    V_Bapeltbangda_1 --> R_RKPD
    V_Bapeltbangda_1 --> R_Renja_PD
    R_Renja_PD --> B[Musrenbang Kec, Pokir DPRD, BA Forum PD/Lintas PD]
    B --> R_Renja_PD
    R_Renja_PD --> RA_Renja_PD_A[Rancangan Akhir Renja PD]
    RA_Renja_PD_A --> V_Bapeltbangda_2{Verifikasi Bapeltbangda Revisi APSP}
    V_Bapeltbangda_2 --> RA_Renja_PD_A
    V_Bapeltbangda_2 --> P_Renja_PD[Penetapan Renja PD]
    P_Renja_PD --> RA_Renja_PD_A
  
```

The flowchart illustrates the PD Planning Process (Rencana Kerja PD). It begins with the preparation of the initial RKPD (Rancangan Awal RKPD), which leads to the RKPD (Rancangan RKPD). This is followed by the RKPD Musrenbang (Musrenbang RKPD) and the final RKPD (Rancangan Akhir RKPD), leading to the RKPD Determination (Penetapan RKPD). The process then moves to the initial Renja PD (Rancangan Awal Renja PD), which leads to the Renja PD (Rancangan Renja PD). A verification step (Verifikasi Bapeltbangda) follows, which can lead back to the RKPD or forward to the Renja PD. The Renja PD is then discussed in the Musrenbang Kecamatan, DPRD Pokir, and PD/Lintas PD Forum (BA Musrenbang Kec, Pokir DPRD, BA Forum PD/Lintas PD). This leads to the final Renja PD (Rancangan Akhir Renja PD), which undergoes another verification step (Verifikasi Bapeltbangda Revisi APSP). This final verification can lead back to the final Renja PD or forward to the Renja PD Determination (Penetapan Renja PD), which then leads back to the initial Renja PD.

Renja Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan tahunan harus disusun dengan berpedoman pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan Pemerintah Daerah, dan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, yang merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan. Renstra Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan daerah. Selanjutnya Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam menyusun RKA sebelum ditetapkan menjadi APBD.

Gambar 1.2 Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan hukum Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

12. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 130);
13. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 136);
14. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 41 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, dan Sistem Kerja Di Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 1381);
15. Peraturan Walikota Batam Nomor 206 Tahun 2024 tentang Pedoman Tekhnis Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 1546);
16. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 44 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2026 (Berita Daerah Kota Batam Nomor 1614);
17. Peraturan Wali Kota Batam Nomor Tahun tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam Tahun (Berita Daerah Kota Batam Tahun Nomor).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan tahun 2026, dan memberi gambaran perencanaan program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sesuai tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam Tahun Anggaran 2026

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam ini adalah untuk mensinergikan program dan kegiatan yang ada di Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam dalam dokumen perencanaan daerah (RKPD) Tahun 2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Perangkat Daerah meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan latar belakang penulisan (1.1), dasar hukum (1.2), maksud dan tujuan (1.3), dan sistematika penulisan (1.4).

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

Menguraikan tentang evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun lalu (2.1), analisis kinerja pelayanan perangkat daerah (2.2), isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah (2.3), review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) (2.4) dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat (2.5).

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Menguraikan tentang telaahan terhadap kebijakan nasional (3.1). tujuan dan sasaran Renja perangkat daerah (3.2), program dan kegiatan (3.3) yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai target sasaran kinerja Rencana Strategis

(Renstra) untuk Tahun 2026 yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah Tahun 2026.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Memuat rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah Tahun 2026

BAB V PENUTUP

Menguraikan tentang kesimpulan, catatan penting, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Evaluasi terhadap Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam Tahun 2024 meliputi 3 (tiga) hal yaitu kebijakan perencanaan program dan kegiatan, pelaksanaan rencana program dan kegiatan, dan hasil rencana program dan kegiatan.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan 2024 sebagai berikut:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam Tahun Anggaran 2024 adalah :
 - a) Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia, mempunyai target 15 Orang, dan capaian yang diperoleh hanya 12 Orang, Dikarenakan tempat tujuan yang semula di Daerah Bogor Jawa Barat di alihkan Ke Daerah Istimewa Jogjakarta, sehingga Volume penganggaran menjadi berubah sesuai dengan SSH. Capaian Realisasi Keuangan mencapai 80%.
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dari target fisik yaitu 100% mencapai 100% Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam adalah :
 - a) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b) Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - c) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - d) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - e) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - f) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - g) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - h) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - i) Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
 - j) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - k) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - l) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - m) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - n) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

- o) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - p) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - q) Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - r) Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Keternteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan
 - s) Sub Kegiatan Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
 - t) Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Dalam Rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada
 - u) Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - v) Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota
 - w) Sub Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota
 - x) Sub Kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota
 - y) Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Karir PPNS.
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024 adalah, Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum dari Target 8 unit menjadi 129 Unit, dikarenakan adanya penambahan Sarana dan Prasarana Trantibum untuk Kegiatan Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa.
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, target kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam Tahun 2024 adalah Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia, karna target dari 15 orang terealisasi 12 orang, karena yang sebelumnya kegiatan di Bogor Jawa Barat di alihkan ke Daerah Istimewa Jogjakarta, sehingga pagu Anggaran kode Rekeningnya disesuaikan dengan SSH.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam;
- Dengan tidak tercapainya target program dimaksud maka berakibat belum tercapainya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Trantibum di Kota Batam Tahun 2024.

Tabel 2.1

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025
Kota Batam**

Nama Perangkat Daerah : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) /Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025-2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat) Daerah Tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024(n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2025 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar									
1.05	Bidang Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum									
01.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP PD	79.85%	0	0	0	0	73.05	73.05	91.48%
		Indeks Pelayanan Keseekretariatan PD	95	0	0	0	0	87	87	91.58
1.05.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang tersusun sesuai dengan tahapan dan waktu	100%	0	0	0	0	0	0	0
1.05.01.2.01.0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9	0	0	0	0	0	0	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) /Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025-2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat) Daerah Tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024(n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2025 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.05.01.2.01.0007	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12	0	0	0	0	0	0	0
1.05.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan	100%	0	0	0	0	100%	100%	100%
1.05.01.2.02.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	598 Orang/Bulan	0	0	0	0	598 Orang/Bulan	585 Orang/Bulan	97.83%
1.05.01.2.02.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Sub Kegiatan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60 Dokumen	0	0	0	0	12 Dokumen	12 Dokumen	20%
1.05.01.2.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah yang Tercatat dalam Daftar Inventaris Barang (DIB)	100%	0	0	0	0	0	0	0
1.05.01.2.03.0002	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen	0	0	0	0	0	0	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) /Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025-2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat) Daerah Tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024(n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2025 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.05.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	100%	0	0	0	0	84.73	84.73	84.70%
1.05.01.2.05.0002	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	3 Paket	0	0	0	0	3 Paket	3 Paket	100 %
1.05.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsinya	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsinya yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan	129 Orang	0	0	0	0	111 Orang	111 Orang	86.05%
1.05.01.2.05	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100%	0	0	0	0	100%	100%	100%
1.05.01.2.06.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	0	0	0	0	1 Paket	1 Paket	20.%
1.05.01.2.06.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	34 Paket	0	0	0	0	5 Paket	5 Paket	15.15%
1.05.01.2.06.0003	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang	4 Paket	0	0	0	0	0	0	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) /Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025-2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024(n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2025 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Disediakan								
1.05.01.2.06.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15 Paket	0	0	0	0	3 Paket	3 Paket	20%
1.05.01.2.06.0005	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	0	0	0	0	2 Paket	2 Paket	20%
1.05.01.2.06.0006	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	0	0	0	0	12 Dokumen	9 Dokumen	75%
1.05.01.2.06.0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	0	0	0	0	12 Laporan	12 Laporan	100%
1.05.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan	100%	0	0	0	0	100%	100%	100%
1.05.01.2.07.0002	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	0	0	0	0	1	1	100%
1.05.01.2.07.0005	Sub Kegiatan Mebel	Jumlah Paket mebel yang Disediakan	208 Unit	0	0	0	0	72 Unit	72 Unit	34.62%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) /Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025-2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat) Daerah Tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024(n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2025 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.05.01.2.07.0006	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	294 Unit	0	0	0	0	21 Unit	21 Unit	7.14%
1.05.01.2.07.0011	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0	0	0	0	0	0	0
1.05.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100%	0	0	0	0	100%	100%	20%
1.05.01.2.08.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 laporan	0	0	0	0	12 Laporan	12 Laporan	20%
1.05.01.2.08.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	60 Laporan	0	0	0	0	12 Laporan	12 Laporan	20%
1.05.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	100%	0	0	0	0	100%	100%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) /Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025-2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024(n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2025 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.05.01.2.09.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	0	0	0	0	1 Unit	1 Unit	100%
1.05.01.2.09.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	0	0	0	0	11 Unit	11 Unit	100%
1.05.01.2.09.0006	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	32 Unit	0	0	0	0	28 Unit	28 Unit	87.5%
1.05.01.2.09.0009	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	0	0	0	0	2 Unit	2 Unit	50%
	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1. Persentase Penyelenggaraan trantibum yang dilaksanakan oleh Satpol PP	100	0	0	0	0	100	100	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) /Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025-2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat) Daerah Tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024(n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2025 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		2. Persentase Jumlah Anggota Satpol PP Yang telah mengikuti Diklat Dasar	39.97%	0	0	0	0	19.57%	19.57%	48.96%
		3. Persentase Perda Perkada yang di tegakan	100%	0	0	0	0	100	100	100%
		4. Persentase Penyelenggaraan Satlinmas	100%	0	0	0	0	9.09	9.09	9.09%
	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	1. Persentase Capaian Strategi dalam Penyelenggaraan trantibum	100%	0	0	0	0	100%	100%	100%
		2. Persentase Capaian Strategi, Peningkatan efektivitas Pelayanan dan Pemberdayaan SDM dalam Penyelenggaraan Satlinmas	100%	0	0	0	0	9.09	0	0
		3. Persentase Pemberdayaan dan Peningkatan Kapasitas SDM Satpol PP	39.97%	0	0	0	0	19.57	0%	0%
		4. Persentase Jumlah Sarana	100%	0	0	0	0	100%	100%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) /Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025-2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat) Daerah Tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024(n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2025 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		prasarana minimal yang digunakan sebagai penunjang penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman dan Perlindungan masyarakat								
		5. Persentase warga negara yang memperoleh layanan terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada	100%	0	0	0	0	100	100%	100%
1.05.02.2.01.0003	Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat tingkat	Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum dan perlindungan	12 Dokumen	0	0	0	0	12 Dokumen	12 Dokumen	50%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) /Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025-2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat) Daerah Tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024(n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2025 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Kabupaten/Kota	masyarakat tingkat kabupaten dan kota								
1.05.02.2.01.0004	Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	12 Dokumen	0	0	0	0	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
1.05.02.2.01.0006	Sub Kegiatan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	12 Dokumen	0	0	0	0	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
1.05.02.2.01.0008	Sub Kegiatan Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	12 Dokumen	0	0	0	0	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
1.05.02.2.01.0010	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong	Jumlah aparatur Satpol pp yang mengikuti Pendidikan dan	130 Orang	0	0	0	0	5 Orang	5 Orang	3,85 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) /Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025-2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat) Daerah Tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024(n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2025 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PP Fungsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional	pelatihan dasar polisi pamong praja								
1.05.02.2.01.0013	Sub Kegiatan Peningkatan Kapastias SDM Satuan Perlindungan Masyarakat	Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	440 Orang	0	0	0	0	40 Orang	40 Orang	7,12%
1.05.02.2.01.0015	Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketertnteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	60 Laporan	0	0	0	0	12 Laporan	12 Laporan	20%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) /Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025-2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat) Daerah Tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024(n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2025 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.05.02.2.01.0016	Sub Kegiatan Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	60 Laporan	0	0	0	0	12 Laporan	12 Laporan	20%
1.05.02.2.01.0017	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Dalam Rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani Jumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	20 Laporan	0	0	0	0	12 Laporan	12 Laporan	100%
1.05.02.2.01.0018	Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	2.469 Unit	0	0	0	0	9 Unit	9 Unit	0.30%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) /Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025-2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat) Daerah Tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024(n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2025 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.05.02.2.01.0019	Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kab/Kota	Jumlah Dokumen SK Pembentukan Satgas Linmas	4 Dokumen	0	0	0	0	0	0	0
1.05.02.2.02	Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Persentase pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti	100%	0	0	0	0	100%	100%	100%
1.05.02.2.02.0005	Sub Kegiatan Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	4 Dokumen	0	0	0	0	0	0	0
1.05.02.2.02.0006	Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti	Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah	28 Unit	0	0	0	0	0	0	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) /Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025-2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat) Daerah Tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024(n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2025 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.05.02.2.02.0007	Sub Kegiatan Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	24 Laporan	0	0	0	0	0	0	0
1.05.02.2.02.0008	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan	24 Laporan	0	0	0	0	0	0	0
1.05.02.2.02.0010	Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	60 Laporan	0	0	0	0	12 Laporan	12 Laporan	20%
1.05.02.2.02.0011	Sub Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sesuai SOP	60 Laporan	0	0	0	0	12 Laporan	12 Laporan	20%
1.05.02.2.02.0012	Sub Kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap	60 Laporan	0	0	0	0	12 Laporan	12 Laporan	20%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) /Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025-2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat) Daerah Tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024(n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2025 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah								
1.05.02.2.03	Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Rasio PPNS Satpol PP	10.44%	0	0	0	0	6.04%	6.04%	57.85%
1.05.02.2.03.0003	Sub Kegiatan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	12 Dokumen	0	0	0	0	0	0	0
1.05.02.2.03.0004	Sub Kegiatan Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah	8 Laporan	0	0	0	0	0	0	0
1.05.02.2.03.0005	Sub Kegiatan Dukungan Operasional Sekretariat PPNS	Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS	48 Laporan	0	0	0	0	0	0	0
1.05.02.2.03.0006	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Karir PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	20 Laporan	0	0	0	0	12 Laporan	12 Laporan	100%

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menetapkan arah kebijakan strategis yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025–2029. Fokus utama Renstra ini adalah memperkuat peran Satpol PP sebagai perangkat daerah yang menjalankan fungsi penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.

Selama periode Renstra 2025–2029, alokasi anggaran Satpol PP dirancang secara bertahap, disesuaikan dengan prioritas program dan kegiatan strategis. Penganggaran mengacu pada prinsip efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas, serta mempertimbangkan ketersediaan fiskal daerah. Strategi pengelolaan anggaran difokuskan pada:

1. Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM, termasuk pelatihan, peningkatan kesejahteraan personel, serta pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana operasional.
2. Optimalisasi Penegakan Hukum Daerah, melalui sistem pengawasan, patroli terpadu, serta peningkatan kerja sama lintas sektor.
3. Peningkatan Respons Pelayanan Perlindungan Masyarakat, termasuk penanganan, Sosialisasi dan penertiban gangguan ketertiban umum.
4. Penyediaan Infrastruktur Pendukung, seperti pembangunan, Pemeliharaan, kendaraan operasional, dan sistem informasi berbasis teknologi.

Satpol PP Mempunya 2 Program dan 11 Kegiatan, Untuk mendukung pencapaian tujuan strategis, berikut adalah sasaran Satpol PP selama periode Renstra 2025–2029, Sasaran Satpol PP Kota Batam sebagai berikut :

- a) Terwujudnya Penyelenggaraan Ketenteraman Ketertiban Umum, dan Perda Perkada;
- b) Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan kinerja layanan kesekretariatan;

Estimasi total kebutuhan anggaran selama lima tahun ke depan diproyeksikan mengalami peningkatan secara bertahap untuk mengakomodasi peningkatan Kinerja Satpol PP diharapkan mampu menjadi garda terdepan dalam menjaga ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat secara professional, responsive, dan humanis.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam berisikan capaian kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018.

Indikator kinerja kunci Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam Kota Batam Tahun 2024 mempunyai capaian sebagai berikut :

- Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan target pencapaian 100 % dan realisasi 100%
- Persentase Penegakan Perda Perkada yang di tegakan targetnya 100% dan Realisasinya 100%

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2024 (tahun n-2)	Tahun 2025 (tahun n-1)	Tahun 2026 (tahun n1)	Tahun 2027 (tahun n+1)	Tahun 2024 (tahun n-2)	Tahun 2025 (tahun n-1)	Tahun 2026 (tahun n)	Tahun 2027 (tahun n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	10	11	12	13
1	Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat			0	51.78	60,48%	70,81%	0	0	60,48%	70,81%	
2	Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (IPKKU)			0	80.67	84.34	85.73	0	0	84.34	85.73	
3	Indeks Penyelenggaraan Manajemen Satuan Perlindungan Masyarakat (IPM)			0	22.89	36.62%	55.89%	0	0	36.62%	55.89%	
4	Indeks Kepuasan Masyarakat di Satuan Polisi Pamong Praja			0	87	89	91	0	0	89	91	
5			Persentase Penyelenggaraan trantibum yang dilaksanakan oleh Satpol PP	0	100	100	100	100	0	100	100	
			Persentase Jumlah Anggota Satpol PP yang telah Mengikuti Diklat	63.19	19.57	23.41	28.93	63.19	19.23	23.41	28.93	

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2024 (tahun n-2)	Tahun 2025 (tahun n-1)	Tahun 2026 (tahun n1)	Tahun 2027 (tahun n+1)	Tahun 2024 (tahun n-2)	Tahun 2025 (tahun n-1)	Tahun 2026 (tahun n)	Tahun 2027 (tahun n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	10	11	12	13
6			Persentase Perda Perkada yang di tegakan	0	100	100	100	100	0	100	100	
7			Persentase Penyelenggaraan Satlinmas	0	9.09	31.82	54.55	0	0	31.82	54.55	
8			Nilai SAKIP PD	70.49	73.05	74.70	75.95	0	0	74.70	75.95	
9			Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	85.01	87	89	91	0	0	89	91	
10		Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh layanan akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada Kabupaten/Kota		4	12	12	12	0	0	12	12	

Keterangan:
Indikator mengacu pada Bab VII Renstra Perangkat Daerah

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.3.1 Tingkat Kinerja Perangkat Daerah

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Perda Perkada serta tugas lain yang diberikan Wali Kota.

Dalam pelaksanaan tugasnya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Dalam pelaksanaan tugas, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis Operasional di bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Bidang Penegakan Perundang-undangan daerah, Bidang Sumber Daya Aparatur, dan Bidang Perlindungan Masyarakat.
- b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan Perlindungan Masyarakat;
- c. Pembinaan, Pelaksanaan, Pengawasan, dan Penegakan di Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah dan Perlindungan Masyarakat, sudah diterapkan atas dasar Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 pasal 25 yaitu Pembinaan teknis operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Huruf c dilakukan oleh kepala daerah, kepala satpol PP dalam penegakan Perda dan Perkada, Penyelenggaraan perlindungan masyarakat, diantaranya pembinaan etika profesi, koordinasi Satpol PP, Pengembangan Pengetahuan dan Keterampilan melalui diklatsar, PPNS, Diklat Intelijen.
- d. Pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan.
Pelaksanaan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam Pelaporan Penerapan SPM dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilakukan setiap triwulan dalam aplikasi E-SPM, SPIP, Semenanjung, SIPD.RI.

2.3.2 Permasalahan dan Hambatan

Didalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam Kota Batam, tentu tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi, baik dalam peningkatan kinerja maupun kinerja pelayanan. Faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan-permasalahan tersebut, dapat dikategorikan dalam dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

A. Permasalahan Internal

1. Perlunya Pemahaman anggota terkait Pelaporan Kinerja;
2. Perlunya Peningkatan SDM Polisi Pamong Praja;
3. Lemahnya Peran Linmas;

4. Keterbatasan Sarpras;
5. Belum Optimalnya pelaksanaan tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja;
6. SOP yang tidak memiliki Standar yang konsisten;

B. Permasalahan Eksternal

1. Perlunya upaya Koordinasi dengan Instansi terkait;
2. Perlunya peningkatan upaya Pengawasan Pelanggaran Trantibum dan perda perkada ;
3. Masih tingginya Pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
4. Masih tingginya Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah.
5. Pemahaman Masyarakat terhadap Peraturan-peraturan daerah masih kurang;
6. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga ketenteraman dan ketertiban umum.

C. Penanganan dalam permasalahan eksternal :

- 1 Mengundang instansi terkait untuk berkoordinasi dalam menjalankan tugas sehingga dalam pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan baik serta dapat meminimalkan dampak yang terjadi.
- 2 Meningkatkan kuantitas pengawasan melalui patroli yang dilakukan untuk menekan dan mencegah pelanggaran Trantibum dan perda perkada yang ada di Kota Batam.
- 3 Menempatkan Anggota Satpol PP pada masing-masing kecamatan yang ada di Kota Serta di Kelurahan yang diharapkan akan membantu memaksimalkan dari kegiatan pengawasan dan memonitor langsung ke wilayah masing-masing.
- 4 Memberikan sanksi terhadap pelanggar Peraturan Daerah melalui Sub Kegiatan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah serta memberikan pemahaman langsung kepada pelanggar Peraturan Daerah.
- 5 Dengan melalui Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di harapkan akan mampu menambah wawasan masyarakat terhadap pemahaman Peraturan Daerah yang ada di Kota Batam serta dapat meminimalkan dari pelanggaran peraturan-peraturan daerah tersebut.
- 6 Berkoordinasi dengan Instansi terkait serta dengan para tokoh masyarakat dalam upaya menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan sekitar sehingga diharapkan akan mampu menjaga ketenteraman dan ketertiban umum.

Permasalahan yang ada di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam baik secara internal maupun eksternal akan mempengaruhi dampak bagi Visi dan Misi Kota Batam, dengan adanya permasalahan di atas maka dalam menuju Visi dan Misi Kota Batam akan sedikit terhambat karena dalam mewujudkan Visi dan Misi tersebut perlu adanya campur tangan dari berbagai stakeholder serta kesadaran dari masyarakat Kota

Batam dalam mentaati Peraturan Daerah yang ada. Sebagai contoh ketika terdapat masyarakat yang melanggar Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum yaitu membangun bangunan yang tidak pada tempatnya maka akan mempengaruhi Pembangunan Kota yang sudah masuk dalam perencanaan pembangunan berkelanjutan.

Analisis terhadap lingkungan internal Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam memperlihatkan unsur-unsur kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

a. Kekuatan (*Strength*)

1. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 41 Tahun 2024 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 1381).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
4. Jumlah SDM yang besar
5. Dukungan dari Pemerintah Kota Batam
6. Adanya Kerjasama antar Instansi

b. Kelemahan (*weaknesses*)

1. Terbatasnya SDM yang berkualitas dan masih kurangnya kompetensi SDM dalam melaksanakan tugas;
2. Belum optimalnya koordinasi dengan instansi terkait;
3. Sarana dan Prasarana yang tidak mendukung;

2.3.3 Tantangan dan Peluang

Untuk pengembangan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi yaitu:

- a. Maraknya Pedagang Kaki Lima dan rumah liar
- b. Adanya gangguan dari oknum-oknum yang memback-up tempat usaha yang melanggar Perda/Perkada
- c. Kurangnya kesadaran masyarakat terkait trantibum dan perda perkada
- d. Tuntutan Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik, yang diukur melalui SAKIP.
- e. Tuntutan Peningkatan Kompetensi Aparatur Satpol PP Baik secara sikap, Pengetahuan, dan wawancara.
- f. Tuntutan Hasil pelaksanaan tugas dan fungsi yang lebih baik

Di samping tantangan yang dihadapi terdapat pula beberapa peluang yang dapat mengembangkan pelayanan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam yaitu:

- a. Adanya dukungan anggaran dan sarpras dari Pemerintah Kota Batam;
- b. Pemerintah memfasilitasi pengembangan SDM
- c. Adanya Diklat-diklat yang diberikan kepada personil PNS Satpol PP dalam pengembangan kompetensi.

- d. Keberadaan Jafung Pol PP
- e. Adanya potensi aparat Satpol PP hasil mengikuti Diklat

2.3.4 Isu-Isu Penting/Strategis Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan analisis kritikal, maka dapat diidentifikasi isu-isu strategis yang sedang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam antara lain:

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia;
2. Belum optimalnya pelaksanaan Penegakan Trantibum dan Perda Perkada;
3. Sarana dan Prasarana yang tidak mendukung;
4. Adanya gangguan dari oknum-oknum yang memback-up tempat usaha yang melanggar Perda/Perkada;

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan kerangka dan langkah awal dalam menghimpun dan menyusun semua rencana kebutuhan pembangunan daerah. Sudah menjadi kewajiban apabila kebutuhan akan selalu lebih besar daripada sumber daya yang dimiliki. maka dilakukanlah seleksi terhadap rencana pembangunan untuk menuju skala prioritas rencana pembangunan hingga akhirnya disusunlah rumusan kebijakan umum anggaran berkaitan dengan arah kebijakan RKPD.

Review terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan rumusan kebutuhan program dan kegiatan tahun 2026 disajikan pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026
Kota Batam**

Nama Perangkat Daerah : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indukatif Rp. 64.514.850.364	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana 88.013.485.047	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Batam	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	59.951.706.324	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Batam	Nilai SAKIP PD	74.70	80.557.069.746	
								Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	89		
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Batam	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang tersusun sesuai dengan tahapan dan waktu	-	-	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Batam	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang tersusun sesuai dengan tahapan dan waktu	100%	9.955.800	
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Batam	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Batam	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	4.089.000	
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Batam	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Batam	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	5.866.800	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Batam	Persentase administrasi keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	33.147.120.090	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Batam	Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan	100%	77.708.384.174	
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Batam	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	195 Orang/ Bulan	33.083.460.090	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Batam	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	598 Orang/ Bulan	77.640.944.174	
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Batam	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	300 Dokumen	63.660.000	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Batam	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	0	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indukatif Rp. 64.514.850.364	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana 88.013.485.047	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Batam	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	-	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Batam	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	67.440.000	
	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Batam	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah yang Tercatat dalam Daftar Inventaris Barang (DIB)	-	-	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Batam	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah yang Tercatat dalam Daftar Inventaris Barang (DIB)	100%	8.405.000	
	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Batam	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Batam	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	8.405.000	
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Batam	Persentase Rata-Rata Layanan Administrasi Kepegawaian yang Difasilitasi	100%	1.299.441.090	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Batam	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	3.82%	49.870.000	
	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Batam	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	1.299.441.090	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Batam	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	0	
	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsinya	Batam	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsinya yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan	-	-	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsinya	Batam	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsinya yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan	5 Orang	49.870.000	
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Batam	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	644,276,086	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Batam	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100%	446.217.100	
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Batam	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	7,994,350	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Batam	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	8.119.200	
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Batam	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	147,675,904	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Batam	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	187.711.500	
	Sub Kegiatan Penyediaan	Batam	Jumlah Paket Peralatan	-	-	Sub Kegiatan	Batam	Jumlah Paket	1 Paket	29.160.300	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indukatif Rp. 64.514.850.364	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana 88.013.485.047	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Peralatan Rumah Tangga		Rumah Tangga yang Disediakan			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Batam	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	194,365,903	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Batam	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	87.031.100	
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Batam	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	55,911,587	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Batam	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	46.085.600	
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Batam	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	8,303,722	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Batam	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	1.970.400	
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Batam	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	230,024,620	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Batam	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	86.139.000	
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Batam	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terpenuhi	100%	1,664,385,822	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Batam	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan	100%	1.045.493.208	
	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Batam	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	837,821,745	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Batam	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	0	
	Sub Kegiatan Mebel	Batam	Jumlah Paket mebel yang Disediakan	5 Unit	296,970,031	Sub Kegiatan Mebel	Batam	Jumlah Paket mebel yang Disediakan	46 Unit	478.052.200	
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Batam	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	529,594,046	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Batam	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	70 Unit	383.565.408	
	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Batam	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	0	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Batam	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	183.875.600	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Batam	Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	21,342,764,646	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Batam	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai	100%	381.830.464	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indukatif Rp. 64.514.850.364	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana 88.013.485.047	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			yang Terpenuhi			Daerah		perencanaan			
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Batam	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	253,263,508	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Batam	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	212.470.000	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Batam	Jumlah Laporan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan	21,089,501,138	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Batam	Jumlah Laporan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan	169.360.464	
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Batam	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terlaksana	100%	1,853,718,590	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Batam	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	100%	906.914.000	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Batam	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	93,140,078	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Batam	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	41.380.000	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Batam	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	516,825,937	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Batam	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	161.210.000	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Batam	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	70 Unit	29,720,403	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Batam	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	51 Unit	35.900.000	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Batam	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	4 Unit	1,214,032,172	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Batam	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	668.424.000	
	Program Peningkatan Ketenteraman dan	Batam	1. Persentase Gangguan Trantibum yang dapat	100%	4,563,144,040.	Program Peningkatan Ketenteraman dan	Batam	1 Persentase Penyelenggaraan	100%	7.456.415.301	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indukatif Rp. 64.514.850.364	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana 88.013.485.047	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ketertiban Umum		Diselesaikan			Ketertiban Umum		trantibum yang dilaksanakan oleh satpol pp			
			2 Persentase Penegakan Perda dan Perkada	100%				2 Persentase Jumlah Anggota Satpol PP yang telah Mengikuti Diklat Dasar	23.41%		
			3 Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Terkena Dampak Gangguan Trantibum Akibat Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Perda dan Perkada	100%				3 Persentase Penegakan Perda Perkada yang di tegakan	100%		
								4 Persentase Penyelenggaraan Satlinmas	31.82%		
	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Batam	1 Persentase Pelanggaran dan Pengaduan Trantibum yang Ditangani	100%	3,395,007,978	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Batam	1 Persentase Capaian Strategi dalam Penyelenggaraan trantibum	100%	7.042.376.301	
			2 Persentase Satlinmas yang Terlatih dan Dikukuhkan	100%				2 Persentase Capaian Strategi, Peningkatan efektivitas Pelayanan dan Pemberdayaan SDM dalam Penyelenggaraan Satlinmas	31.82%		
			3 Peresentase Polisi Pamong Praja yang memenuhi Standar Kualifikasi	100%				3 Persentase Pemberdayaan dan Peningkatan Kapasitas SDM Satpol PP	23.41%		
			4 Warga Negara yang memperoleh Layanan Terkena Dampak Gangguan Trantibum Akibat Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Perda dan Perkada	4 Orang				4 Persentase warga negara yang memperoleh layanan terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda	100%		

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indukatif Rp. 64.514.850.364	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana 88.013.485.047	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								dan Perkadadan Perkada			
			5 Persentase Jenis Sarpras Trantibum yang terpenuhi sesuai kebutuhan	100%				5 Persentase jenis sarpras Trantibum yang terpenuhi sesuai kebutuhan	100%		
	Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat tingkat Kabupaten/Kota	Batam	Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat kabupaten dan kota	1 Dokumen	55,747,035	Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat tingkat Kabupaten/Kota	Batam	Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat kabupaten dan kota	5 Dokumen	3.264.600	
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Batam	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	1 Dokumen	154,376,362	Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Batam	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	8 Dokumen	89.002.000	
	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk Dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Batam		26 Orang	292,523,676	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk Dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Batam		-	0	
	Sub Kegiatan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan	Batam	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik	1 Dokumen	55,747,035	Sub Kegiatan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam	Batam	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik	3 Dokumen	1.875.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indukatif Rp. 64.514.850.364	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana 88.013.485.047	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum		Pencegahan Kejahatan			Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum		Pencegahan Kejahatan			
	Sub Kegiatan Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Batam	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	-	0	Sub Kegiatan Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Batam	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	0	0	
	Sub Kegiatan Peningkatan Kapastias SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PP Fungsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional	Batam	Jumlah aparatatur Satpol pp yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan dasar polisi pamong praja	-	0	Sub Kegiatan Peningkatan Kapastias SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PP Fungsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional	Batam	Jumlah aparatatur Satpol pp yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan dasar polisi pamong praja	35 Orang	198.202.000	
	Sub Kegiatan Peningkatan Kapastias SDM Satuan Perlindungan Masyarakat	Batam	Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	40 Orang	34.536.000	Sub Kegiatan Peningkatan Kapastias SDM Satuan Perlindungan Masyarakat	Batam	Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	100 Orang	49.770.200	
	Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Batam	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	12 Laporan	170,217,997	Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Batam	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	12 Laporan	79.260.000	
	Sub Kegiatan Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui	Batam	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui	12 Laporan	1,105,771,003	Sub Kegiatan Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Batam	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui	12 Laporan	1.074.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indukatif Rp. 64.514.850.364	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana 88.013.485.047	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa		Penertiban dan Penanganan unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan			Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa		Penertiban dan Penanganan unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan			
	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Dasar Dalam Rangka Dampak Penegakan Peraturan da dan Peraturan Kepala Daerah	Batam	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	1 Laporan	55,747,036	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Dasar Dalam Rangka Dampak Penegakan Peraturan da dan Peraturan Kepala Daerah	Batam	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	6 Laporan	25.000.000	
	Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Batam	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	15 Unit	1,504,877,834	Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Batam	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	615 Unit	5.475.273.901	
	Sub Kegiatan Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kab/Kota	Batam	Jumlah Dokumen SK Pembentukan Satgas Linmas	-	0	Sub Kegiatan Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kab/Kota	Batam	Jumlah Dokumen SK Pembentukan Satgas Linmas	1 Dokumen	46.728.600	
	Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Batam	Persentase Pelanggaran Perda yang Ditindaklanjuti	100%	1,035,270,809	Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Batam	Persentase Capaian Strategi dalam Penegakan Perda Perkada	100%	270.371.000	
	Sub Kegiatan Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Batam	Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	0	Sub Kegiatan Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Batam	Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1 Dokumen	12.351.000	
	Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang	Batam	Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah	-	0	Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksaan, Gelar	Batam	Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah	11 Unit	70.747.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indukatif Rp. 64.514.850.364	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana 88.013.485.047	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Bukti)					Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)					
	Sub Kegiatan Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Batam	Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	0	Sub Kegiatan Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Batam	Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	6 Laporan	7.920.000	
	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sidang Atas Pelanggaran Peraturan Daerah	Batam	Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan	-	0	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sidang Atas Pelanggaran Peraturan Daerah	Batam	Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan	6 Laporan	52.200.000	
	Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Batam	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat /Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha	12 Laporan	74,121,258	Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Batam	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat /Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha	12 Laporan	16.113.000	
	Sub Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Batam	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	6 Laporan	253,805,101	Sub Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Batam	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	12 Laporan	23.880.000	
	Sub Kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Batam	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	30 Laporan	707,344,449	Sub Kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Batam	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	12 Laporan	87.160.000	
	Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Batam	Rasio PPNS Satpol PP	8.72%	132.865.254	Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Batam	Rasio PPNS Satpol PP	7.14%	143.668.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indukatif Rp. 64.514.850.364	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana 88.013.485.047	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Sub Kegiatan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Batam	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	-	0	Sub Kegiatan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Batam	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	3 Dokumen	2.551.500	
	Sub Kegiatan Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah	Batam	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah	-	0	Sub Kegiatan Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah	Batam	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah	2 Laporan	66.384.000	
	Sub Kegiatan Dukungan Operasional Sekretariat PPNS	Batam	Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS	-	0	Sub Kegiatan Dukungan Operasional Sekretariat PPNS	Batam	Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS	12 Laporan	44.534.500	
	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Batam	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	3 Laporan	132.865.254	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Batam	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	3 Laporan	30.198.000	
	Total				64.514.850.364					88.013.485.047	

Catatan :
Untuk Tabel ini diisi pada saat Rancangan Renja, setelah terbitnya Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam membuka akses yang luas kepada pemangku kepentingan dalam memberikan usulan pembangunan di daerahnya. Usulan rencana pembangunan dapat berasal bottom up yaitu usulan dari masyarakat melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mulai dari tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Tingkat Kota Batam hingga Tingkat Provinsi. Selain itu usulan rencana pembangunan juga berasal dari usulan top down dari kunjungan kerja Wali Kota dan Reses DPRD.

Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat yang diusulkan oleh pemangku kepentingan berdasarkan pada hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota Batam yang mana penjangkaran kebutuhan masyarakat dilakukan melalui SIPD yang diajukan kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam. Usulan kegiatan masyarakat selanjutnya akan diverifikasi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam berdasarkan syarat teknis yang telah ditentukan. Selanjutnya akan ditentukan usulan prioritas yang dapat diakomodir oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam sesuai dengan skala prioritas dan kebutuhan serta anggaran. Adapun tabel hasil kajian usulan program dan kegiatan masyarakat tahun 2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Kota Batam

Nama Perangkat Daerah : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
		NIHIL			

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan nasional merupakan upaya semua komponen bangsa yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berdasarkan Pancasila. Pencapaian tujuan ini dilaksanakan secara bertahap, mulai dari jangka panjang, jangka menengah, hingga tahunan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 menggariskan Visi Indonesia tahun 2045 yaitu Indonesia Emas 2045 Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersatu Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan yang pelaksanaannya di bagi kedalam empat tahap pembangunan jangka menengah. Pembangunan Tahun 2026 berada pada tahap jangka menengah yang ke-1 yang arahnya digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2045 dengan Visi **“Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”** dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026.

Misi Presiden dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 adalah **“Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”**. Misi yang ditetapkan adalah:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur.

Sementara itu, tema RKP 2026 **“Kedaulatan Pangan & Energi serta Ekonomi Produktif & Inklusif”**, RKP 2026 diposisikan sebagai fondasi transformasi ekonomi struktural menuju visi **Indonesia Emas 2045**, dengan fokus pada kedaulatan pangan dan energi, serta pembangunan ekonomi yang produktif dan inklusif:

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam sebagai lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perda dan perkara, maka keluaran (output) kegiatan yang dihasilkan adalah Menurunnya Pelanggaran Trantibum dan Menurunnya Pelanggaran Daerah dan Peraturan Kepada Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Berdasarkan hal tersebut tentunya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam secara spesifik berada pada kebijakan dan prioritas pembangunan nasional.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 mengacu pada tujuan dan sasaran Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam Tahun 2025 - 2029 Adapun tujuan dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam adalah: **“Meningkatkan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum”**, mempunyai target 60.48%.

Sedangkan sasaran dalam mencapai tujuan tersebut mengacu pada Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam Tahun 2025 - 2029 adalah sebagai berikut:

- 1. Terwujudnya Penyelenggaraan Ketenteraman Ketertiban Umum, dan Perda Perkada;
- 2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pemerintahan;

Dalam mencapai tujuan, sasaran dan Indikator tersebut, yang ditetapkan pada Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam Tahun 2026 mengacu pada Renstra PD Tahun 2025 – 2029, yaitu :

- 1. Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat 60.48%;
- 2. Indeks Kepuasan Masyarakat di Satuan Polisi Pamong Praja 89;
- 3. Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (IPKKU) 84.34%;
- 4. Indeks Penyelenggaraan Manajemen Satuan Perlindungan Masyarakat (IPM) 36.62%;

sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.1
Target Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam Tahun 2026

No.	Tujuan/Sasaran PD	Indikator Tujuan/Sasaran PD	Target 2026
1	2	3	4
	Meningkatkan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum	Indeks Penyelenggaraaan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat	60.48%
	1. Terwujudnya Penyelenggaraan Ketenteraman	Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (IPKKU)	84.34%

No.	Tujuan/Sasaran PD	Indikator Tujuan/Sasaran PD	Target 2026
1	2	3	4
	Ketertiban Umum, dan Perda Perkada	Indeks Penyelenggaraan Manajemen Satuan Perlindungan Masyarakat (IPM)	36.62%
	2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat di Satuan Polisi Pamong Praja	89

Keterangan:
Tujuan/sasaran mengacu pada Bab V Renstra Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

Dalam merumuskan program dan kegiatan tahun 2026 mengacu pada pencapaian visi misi Kepala Daerah yang termuat dalam RPJMD Kota Batam 2025 - 2029 yang dirinci dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam Tahun 2025 - 2029 Perumusan program dan kegiatan ini dalam rangka mendukung pencapaian Misi **“BATAM KOTA MADANI YANG INOVATIF, BERBUDAYA DAN BERKELANJUTAN SEBAGAI PUSAT INVESTASI DAN PARIWISATA”** Kota Batam Tahun 2025 - 2029 Dalam dokumen RPJMD tersebut telah dijabarkan indikator dan target capaian tiap tahun yang harus dicapai dengan program dan kegiatan tertentu.

Tahun 2026 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam mengusulkan dua (2) program, sebelas (11) kegiatan, empat puluh tiga (43) sub kegiatan, dengan kebutuhan dana sebesar Rp. 88.013.485.047. (Delapan Puluh Delapan Milyar Tiga Belas Juta Empat ratus Delapan Puluh Lima Ribu Empat Puluh Tujuh Rupiah). Adapun program dan kegiatan yang disusulkan adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota
- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

2) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;

2) Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;

c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

1) Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD;

d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1) Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;

e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;

- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - 3) Sub Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
 - 4) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - 5) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - 6) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
 - 7) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
- f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah:
- 1) Sub Kegiatan Pengadaan Mebel;
 - 2) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - 3) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
- g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah:
- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
- h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah:
- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - 3) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - 4) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;

2. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum

- a. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota:
- 1) Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota;
 - 2) Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - 3) Sub Kegiatan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan Dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - 4) Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja Melalui Pendidikan Dasar Pol PP Fungsional Pol PP dan Uji Kompetensi Bagi Pejabat Fungsional;
 - 5) Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat;
 - 6) Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan;

- 7) Sub Kegiatan Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa;
- 8) Sub Kegiatan Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada;
- 9) Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- 10) Sub Kegiatan Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kab/Kota;
- b. Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota:
 - 1) Sub Kegiatan Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
 - 2) Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti);
 - 3) Sub Kegiatan Penyelidikan Terhadap Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
 - 4) Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah
 - 5) Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
 - 6) Sub Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota;
 - 7) Sub Kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- c. Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota
 - 1) Sub Kegiatan Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan Dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah;
 - 2) Sub Kegiatan Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah;
 - 3) Sub Kegiatan Dukungan Operasional Sekretariat PPNS;
 - 4) Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS;

Tabel 3.2

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiran Maju Tahun 2027
Kota Batam

Nama Perangkat Daerah : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2027 (n+1)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Renstra)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT		Kota Batam	100%	88.013.485.047			-	91.651.646.867
1.5.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai SAKIP PD	Kota Batam	74.70	80.557.069.746	APBD		75.95	87.018.994.667
		Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD		89				91	
1.05.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang tersusun sesuai dengan tahapan dan waktu	Kota Batam	100%	9.955.800	APBD		100%	10.640.200
1.05.01.2.01.0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Batam	2 Dokumen	4.089.000	APBD		3 Dokumen	3.453.400

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2027 (n+1)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Renstra)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.05.01.2.01.0007	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Batam	3 Laporan	5.866.800	APBD		3 Dokumen	7.186.800
1.5.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan	Kota Batam	100%	77.708.384.174	APBD		100%	84.621.042.743
1.5.01.2.02.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Batam	598 Orang/ Bulan	77.640.944.174	APBD		597	84.543.602.743
1.05.01.2.02.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Batam	12 Dokumen	67.440.000	APBD		12 Dokumen	77.440.000
1.05.01.2.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah yang Tercatat dalam Daftar Inventaris Barang (DIB)	Kota Batam	100%	8.405.000	APBD		100%	10.397.000
	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Batam	1 Dokumen	8.405.000			1 Dokumen	10.397.000
1.05.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	Kota Batam	3.82%	49.870.000	APBD		3.82%	50.120.000
1.05.01.2.05.0002	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kota Batam	-	0	APBD		-	0
1.05.01.2.05.0009	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsinya	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsinya yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan	Kota Batam	5 Orang	49.870.000	APBD		5 Orang	50.120.000

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2027 (n+1)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Renstra)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.05.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	Kota Batam	100%	446.217.100	APBD		100%	524.816.800
1.05.01.2.06.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Batam	1 Paket	8.119.200	APBD		1 Paket	9.445.000
1.05.01.2.06.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Batam	7 Paket	187.711.500	APBD		7 Paket	184.211.800
1.05.01.2.06.0003	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Batam	1 Paket	29.160.300	APBD		4 Paket	11.166.000
1.05.01.2.06.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Batam	3 Paket	87.031.100	APBD		3 Paket	122.481.000
1.05.01.2.06.0005	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Batam	2 Paket	46.085.600	APBD		2 Paket	36.905.000
1.05.01.2.06.0006	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Batam	2 Dokumen	1.970.400	APBD		3 Dokumen	5.400.000
1.05.01.2.06.0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Batam	12 Laporan	86.139.000	APBD		12 Laporan	155.208.000

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2027 (n+1)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Renstra)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan	Kota Batam	100%	1.045.493.208	APBD		100%	388.136.804
1.05.01.2.07.0002	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kota Batam	-	0	APBD		-	0
1.05.01.2.07.0005	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kota Batam	46 Unit	478.052.200	APBD		36 Unit	129.791.000
1.05.01.2.07.0006	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Batam	70 Unit	383.565.408	APBD		66 Unit	258.345.804
1.05.01.2.07.0011	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kota Batam	1 Unit	183.875.600	APBD			
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	Kota Batam	100%	381.830.464	APBD		100%	382.735.120
1.05.01.2.08.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Batam	12 Laporan	212.470.000	APBD		12 Laporan	208.170.000
1.05.01.2.08.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Batam	12 Laporan	169.360.464	APBD		12 Laporan	174.565.120

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2027 (n+1)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Renstra)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		yang Disediakan							
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	Kota Batam	100%	906.914.000	APBD		100%	1.031.106.000
1.05.01.2.09.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Batam	1 Unit	41.380.000	APBD		1 Unit	41.380.000
1.05.01.2.09.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Batam	11 Unit	161.210.000	APBD		11 Unit	189.266.00
1.05.01.2.09.0006	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Batam	51 Unit	35.900.000	APBD		28 Unit	21.260.000
1.05.01.2.09.0009	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara / Direhabilitasi	Kota Batam	4 Unit	668.424.000	APBD		4 Unit	779.200.000
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1. Persentase penyelenggaraan trantibum yang di laksanakan oleh	Kota Batam	100%	7.456.415.301	APBD		100	4.632.652.200

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2027 (n+1)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Renstra)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		satpol PP							
		2. persentase jumlah anggota satpol pp yang telah mengikuti diklat dasar		23.41%				28.93%	-
		3. Persentase perda perkara yang di tegakan		100%				100%	
		4. Persentase penyelenggaraan satlimas		31.82%				54.55%	
1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1. Persentase Capaian Strategis dalam Penyelenggaraan Trantibum	Kota Batam	100%	7.042.376.301	APBD	Kota Batam	100%	3.653.109.200
		2. Persentase Capaian Strategis Peningkatan Efektivitas Pelayanan dan Pemberdayaan SDM dalam Penyelenggaraan Satlinmas		31.82%				54.55%	
		3. Persentase Pemberdayaan dan Peningkatan Kapasitas SDM Satpol PP		23.41%				28.93%	
		4. Persentase jenis		100%				100%	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2027 (n+1)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Renstra)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		sarpras Trantibum yang terpenuhi sesuai kebutuhan							
		5. Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Terkena Dampak Gangguan Trantibum Akibat Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Perda dan Perkada		100%				100%	
1.05.02.2.01.0003	Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Batam	5 Dokumen	3.264.600	APBD		6 Dokumen	3.336.000
1.05.02.2.01.0004	Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kota Batam	8 Dokumen	89.002.000	APBD		1 Dokumen	61.204.000
1.05.02.2.01.0005	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong praja dan	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang	Kota Batam	-	0	APBD		-	-

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2027 (n+1)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Renstra)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Ditingkatkan Kapasitasnya							
1.05.02.2.01.0006	Sub Kegiatan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Kota Batam	3 Dokumen	1.875.000	APBD		3 Dokumen	4.510.000
1.05.02.2.01.0008	Sub Kegiatan Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	Kota Batam	-	0	APBD		1 Dokumen	23.630.000
1.05.02.2.01.0010	Sub Kegiatan Peningkatan Kapastias SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui pendidikan dan pelatihan dasar pol pp fungsional pol pp dan uji kompetensi bagi pejabat fungsional	Jumlah aparatur Satpol pp yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan dasar polisi pamong praja	Kota Batam	35 Orang	198.202.000	APBD		35 Orang	287.416.000
1.05.02.2.01.0013	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Perlindungan	Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	Kota Batam	100 Orang	49.770.200	APBD		500 Orang	58.240.000

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2027 (n+1)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Renstra)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Masyarakat								
1.05.02.2.01.0014	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Kota Batam	-	0	APBD		-	-
1.05.02.2.01.0015	Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Kota Batam	12 Laporan	79.260.000	APBD		12 Laporan	93.240.000
1.05.02.2.01.0016	Sub Kegiatan Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Kota Batam	12 Laporan	1.074.000.000	APBD		12 Laporan	1.090.500.000
1.05.02.2.01.0017	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan dasar dalam	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan	Kota Batam	6 Laporan	25.000.000	APBD		7 Laporan	50.000.0000

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2027 (n+1)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Renstra)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani							
1.05.02.2.01.0018	Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	Kota Batam	615 Unit	5.475.273.901	APBD		1.208 Unit	1.894.819.200
1.05.02.2.01.0019	Sub Kegiatan Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kab/Kota	Jumlah Dokumen SK Pembentukan Satgas Linmas	Kota Batam	1 Dokumen	46.728.600	APBD		1 Dokumen	86.214.000
1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Capaian Strategi dalam Penyelenggaraan Perda dan Perkada	Kota Batam	100%	270.371.000	APBD		100%	762.696.000
1.05.02.2.02.0005	Sub Kegiatan Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kota Batam	1 Dokumen	12.351.000	APBD		1 Dokumen	12.984.000
1.05.02.2.02.0006	Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan	Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan	Kota Batam	11 Unit	70.747.000	APBD		24 Unit	61.042.000

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2027 (n+1)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Renstra)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)	Peraturan Daerah							
1.05.02.2.02.0007	Sub Kegiatan Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kota Batam	6 Laporan	7.920.000	APBD		12 Laporan	31.680.000
1.05.02.2.02.0008	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan	Kota Batam	6 Laporan	52.200.000	APBD		12 Laporan	232.000.000
1.05.02.2.02.0010	Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Kota Batam	12 Laporan	16.113.000	APBD		12 Laporan	57.150.000
1.05.02.2.02.0011	Sub Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sesuai SOP	Kota Batam	12 Laporan	23.880.000	APBD		12 Laporan	125.040.000
1.05.02.2.02.0012	Sub Kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan terhadap	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap	Kota Batam	12 Laporan	87.160.000	APBD		12 Laporan	242.800.000

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2027 (n+1)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Renstra)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah							
1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Rasio PPNS Satpol PP	Kota Batam	7.14%	143.668.000	APBD		8.24%	216.847.000
1.05.02.2.03.0003	Sub Kegiatan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Kota Batam	3 Dokumen	2.551.500	APBD		12 Dokumen	2.955.000
1.05.02.2.03.0004	Sub Kegiatan Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah	Kota Batam	2 Laporan	66.384.000	APBD		5 Orang	62.874.000
1.05.02.2.03.0005	Sub Kegiatan Dukungan Operasional Sekretariat PPNS	Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS	Kota Batam	12 Laporan	44.534.500	APBD		12 Laporan	74.473.000
1.05.02.2.03.0006	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	Kota Batam	3 Laporan	30.198.000	APBD		12 Laporan	76.545.000
TOTAL					88.013.485.047				91.651.646.867

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam pada perencanaan Tahun 2026 merupakan tahun ke-5 dalam Renstra Tahun 2021-2026 Adapun rencana kerja untuk mendukung tugas dan fungsi serta merealisasikan visi dan misi, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam untuk Tahun 2026 melaksanakan dua (2) program, delapan (8) kegiatan dengan 29 (43) jenis sub kegiatan beserta usulan pendanaan pagu indikatif tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 4.1
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								88.013.485.047				-	91.651.646.867
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT								88.013.485.047				-	91.651.646.867
1.05.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								80.557.069.746				-	87.018.994.667
1.05.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								9.955.800					10.640.000
1.05.01.2.01.0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Kota Batam, Sagulung, Sagulung Kota	100%	2 Dokumen		4.089.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			3 Dokumen	3.453.400
1.05.01.2.01.0007	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Kota Batam, Sagulung, Sagulung Kota	100%	3 Laporan		5.866.800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			3 Dokumen	7.186.800
1.05.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								77.708.384.174					84.621.042.743
1.05.01.2.02.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN		Kota Batam, Sagulung, Sagulung	100%	598 Orang/ bulan		77.640.944.174	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			598 Orang	84.543.602.743

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	ASN				Kota									
1.05.01.2.02.0003	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsinya yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan		Kota Batam, Sagulung, Sagulung Kota	100%	12 Dokumen		67.440.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			12 Dokumen	77.440.000
1.05.01.2.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								8.405.000					10.397.000
1.05.01.2.03.0002	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Kota Batam, Sagulung, Sagulung Kota		1 Dokumen		8.405.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			12 Dokumen	10.397.000
1.05.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								49.870.000					50.120.000
1.05.01.2.05.0002	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		Kota Batam, Sagulung, Sagulung Kota	3.82%	-		0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			-	-
1.05.01.2.05.0009	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsinya		Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsinya yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan		Kota Batam, Sagulung, Sagulung Kota	3.82%	5 Orang		49.870.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			5 Orang	50.120.000
1.05.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah								446.217.100				-	524.816.800
1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		Kota Batam, Sagulung, Sagulung Kota	100%	1 Paket		8.119.200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 Paket	9.445.000
1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Kota Batam, Sagulung, Sagulung Kota	100%	7 Paket		187.711.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			7 Paket	184.211.800
1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		Kota Batam, Sagulung, Sagulung Kota	100%	1 Paket		29.160.300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			4 Paket	11.166.000
1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		Kota Batam, Sagulung, Sagulung Kota	100%	3 Paket		87.031.100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			3 Paket	122.481.000
1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan		Kota Batam, Sagulung,	100%	2 Paket		46.085.600	PENDAPATAN ASLI DAERAH			2 Paket	36.905.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Penggandaan		Penggandaan yang Disediakan		Sagulung Kota					(PAD)				
1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan		Kota Batam, Sagulung, Sagulung Kota	100%	2 Dokumen		1.970.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			12 Dokumen	5.400.000
1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Kota Batam, Sagulung, Sagulung Kota	100%	12 Laporan		86.139.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			12 Laporan	155.208.000
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								1.045.493.208				-	388.136.804
1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		Kota Batam, Sagulung, Sagulung Kota	100%	-		0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			-	-
1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		Kota Batam, Sagulung, Sagulung Kota	100%	46 Unit		478.052.200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			36 Unit	129.791.000
1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		Kota Batam, Sagulung, Sagulung Kota	100%	70 Unit		383.565.408	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			66 Unit	258.345.804
1.05.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		Kota Batam, Sagulung, Sagulung Kota	100%	1 Unit		183.875.600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			-	0
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								381.830.464				-	382.735.120
1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Kota Batam, Sagulung, Sagulung Kota	100%	12 Laporan		212.470.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			12 Laporan	208.170.000
1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Kota Batam, Sagulung, Sagulung Kota	100%	12 Laporan		169.360.464	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			12 Laporan	174.565.120
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								906.914.000				100	1.031.106.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		Kota Batam, Sagulung, Sagulung Kota	100%	1 Unit		41.380.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1	41.380.000
1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		Kota Batam, Sagulung, Sagulung Kota	100%	11 Unit		161.210.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			11 Unit	189.266.000
1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Kota Batam, Sagulung, Sagulung Kota	100%	51 Unit		35.900.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			28 Unit	21.260.000
1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Reh abilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		Kota Batam, Sagulung, Sagulung Kota	100%	4 Unit		668.424.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			4 Unit	779.200.000
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								7.456.415.301				-	4.632.652.200
1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota								7.042.376.301				-	3.653.109.200
1.05.02.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota		Kota Batam, Sagulung, Sagulung Kota	100%	5 Dokumen		3.264.600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			12 Dokumen	3.336.000
1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum		Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan		Kota Batam, Sagulung, Sagulung Kota	100%	8 Dokumen		89.002.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			12 Dokumen	61.204.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Ketertiban Umum											
1.05.02.2.01.0006	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentrman dan Ketertiban Umum		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan		Kota Batam, Sagulung, Sagulung Kota	100%	3 Dokumen		1.875.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			12 Dokumen	4.510.000
1.05.02.2.01.0008	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat		Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan		Kota Batam, Sagulung, Sagulung Kota	100%	-		0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			12 Dokumen	23.630.000
1.05.02.2.01.0010	Peningkatan Kapastias SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan Dasar Pol PP Fungsional Pol PP dan Uji Kompetensi Bagi Pejabat Fungsional		Jumlah aparatur Satpol pp yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan dasar polisi pamong praja		Kota Batam, Sagulung, Sagulung Kota	100%	35 Orang		198.202.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			33 Orang	287.416.000
1.05.02.2.01.0013	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat		Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya		Kota Batam, Sagulung, Sagulung Kota	100%	100 Orang		49.770.200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			100 Orang	58.240.000
1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan		Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan		Kota Batam, Sagulung, Sagulung Kota	100%	12 Laporan		79.260.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			12 Laporan	93.240.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Pengawasan													
1.05.02.2.01.0016	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa		Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan		Kota Batam, Sagulung, Sagulung Kota	100%	12 Laporan		1.074.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			12 Laporan	1.090.500.000
1.05.02.2.01.0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani.		Kota Batam, Sagulung, Sagulung Kota	100%	6 Laporan		25.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			12 Laporan	50.000.000
1.05.02.2.01.0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum		Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia		Kota Batam, Sagulung, Sagulung Kota	100%	615 Unit		5.475.273.901	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1.208 Unit	1.894.819.200
1.05.02.2.01.0019	Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kab/Kota		Jumlah Dokumen SK Pembentukan Satgas Linmas		Kota Batam, Sagulung, Sagulung Kota		1 Dokumen		86.214.000				12 Dokumen	86.214.000
1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota								270.371.000				-	762.696.000
1.05.02.2.02.0005	Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		Kota Batam, Sagulung, Sagulung Kota	100%	1 Dokumen		12.351.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			12 Dokumen	12.984.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.05.02.2.02.0006	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)		Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah		Kota Batam, Sagulung, Sagulung Kota	100%	11 Unit		70.747.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			8 Unit	61.042.000
1.05.02.2.02.0007	Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		Kota Batam, Sagulung, Sagulung Kota	100%	6 Laporan		7.920.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			12 Laporan	31.680.000
1.05.02.2.02.0008	Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah		Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan		Kota Batam, Sagulung, Sagulung Kota	100%	6 Laporan		52.200.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			12 Laporan	232.000.000
1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah		Kota Batam, Sagulung, Sagulung Kota	100%	12 Laporan		16.113.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			12 Laporan	57.150.000
1.05.02.2.02.0011	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Derah sesuai SOP		Kota Batam, Sagulung, Sagulung Kota	100%	12 Laporan		23.880.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			12 Laporan	125.040.000
1.05.02.2.02.0012	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap		Kota Batam, Sagulung, Sagulung Kota	100%	12 Laporan		87.160.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			12 Laporan	242.800.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah											
1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota								143.668.000				8.24%	216.847.000
1.05.02.2.03.0003	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah		Kota Batam, Sagulung, Sagulung Kota	100%	3 Dokumen		2.551.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		-	12 Dokumen	2.955.000
1.05.02.2.03.0004	Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah		Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah		Kota Batam, Sagulung, Sagulung Kota	100%	2 Laporan		66.384.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			12 Laporan	62.874.000
1.05.02.2.03.0005	Dukungan Operasional Sekretariat PPNS		Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah		Kota Batam, Sagulung, Sagulung Kota	100%	12 Laporan		44.534.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			12 Laporan	74.473.000
1.05.02.2.03.0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS		Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan peningkatan kapasitas pejabat PPNS penegak perda		Kota Batam, Sagulung, Sagulung Kota	100%	3 Laporan		30.198.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			12 Laporan	76.545.000
TOTAL									88.013.485.047					91.651.646.867

Catatan:
Tabel 4.1 merupakan tabel yang diambil dari SIPD - Cetak Laporan Renja PD dari SIPD RI; yang ada kolom prioritas dan sumber dana
Sisipkan Paket-paket pekerjaan pada sub kegiatan terkait sesuai dengan inputan pra-RKA (apabila inputan Ranhir RKPD dengan rincian) atau sesuai pra-RKA manual (apabila inputan Ranhir RKPD dengan tanpa rincian)

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam Kota Batam merupakan dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam Kota Batam pada Tahun 2026 khususnya dan pembangunan tahunan daerah pada umumnya, serta didasarkan pada lintas program melalui mekanisme yang partisipatif, transparan, akuntabel, efektif dan efisien dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kota Batam yang menjadi tanggung jawab Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam.

Sebagai dokumen rencana resmi daerah, diharapkan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam Kota Batam Tahun 2026 dapat dipedomani dan direalisasikan oleh aparaturnya pelaksana program/kegiatan dengan tetap memperhatikan prinsip efektivitas, akuntabilitas dan efisiensi kinerja, baik dari segi fisik maupun penganggarnya.

5.1 Catatan Penting

Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam Kota Batam Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun. Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam Tahun 2026 disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2026 dan berpedoman pada Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam Tahun 2025 - 2029 serta berfungsi sebagai panduan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2026, perencanaan teknis operasional tahunan yang disusun berdasarkan arah kebijakan RPJMD Kota Batam Tahun 2025 – 2029.

Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam Tahun 2026 memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan. Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam Tahun 2026 terdiri atas dua program, Sembilan kegiatan dan Empat Puluh Tiga sub kegiatan. Dokumen Renja ini selanjutnya menjadi pedoman bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2026.

Jika dalam proses perkembangannya pelaksanaan program/kegiatan terjadi perubahan disebabkan adanya perubahan seperti: kerangka ekonomi dan keuangan daerah, target sasaran pembangunan daerah, prioritas pembangunan daerah, penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan perangkat daerah, dan target kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dasar Perubahan RKPD Tahun 2026, maka akan dilakukan perubahan Renja Tahun 2026.

5.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Penyusunan program dan kegiatan pembangunan di dalam Renja ini bertujuan untuk meningkatkan perencanaan pembangunan yang berkualitas. Program dan kegiatan yang direncanakan bertujuan untuk mencapai sasaran-sasaran strategis yang tertuang dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam Tahun 2025 – 2029, yang di dalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas,

transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Beberapa kaidah-kaidah pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

1. Renja Perangkat Daerah menjadi dasar bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan Tahun 2026 yang dalam proses penyusunannya harus memperhatikan/mempedomani hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan dan dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya (RPJMN, RKPD Provinsi, RPJPD Kota, RPJMD Kota, RKPD Kota Batam dan Renstra Perangkat Daerah).
2. Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang menjadi dasar dalam sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kota, APBD Provinsi maupun yang bersumber dari APBN

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Program dan kegiatan pada Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam Tahun 2026 yang direncanakan merupakan prioritas dalam rangka mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan daerah jangka menengah, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan harus tepat waktu sesuai amanat peraturan perundangan yang berlaku.
2. Peningkatan pemahaman dan komitmen seluruh aparatur Pemerintah Kota Batam terhadap perencanaan dan pelaksanaan seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Tahun 2026 dengan efektif dan efisien;
3. Adanya peningkatan kapasitas SDM aparatur untuk melaksanakan tugas yang semakin komplek dengan upaya melalui pendidikan formal, bimtek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur baik melalui luring maupun daring;
4. Dalam menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam, maka seluruh aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam secara berjenjang, bertanggung jawab dan wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Renja Tahun 2026.

Demikian Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam Tahun 2026 yang telah kami susun, semoga dapat bermanfaat bagi peningkatan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam dalam pelayanan Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum

WALI KOTA BATAM

AMSAKAR ACHMAD